

**PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
TERHADAP EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MERDEKA
KECAMATAN MERDEKA KABUPATEN KARO**

Oleh:

Moirongo Laia ¹⁾

Besti Rohana Simbolon ²⁾

Felisman Giawa ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan. ^{1 2 3)}

E-mail:

moislaia29@gmail.com ¹⁾

Bestirohanasimbolon@gmail.com ²⁾

felismangiawa@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The Role of Village Community Empowerment Institutions (LPMD) on the Effectiveness of Development Planning for Merdeka Village, Merdeka District, Karo Regency. LPMD is a partner that supports the village government in planning and implementing development activities. However, obstacles were found in carrying out their roles, such as village communities who did not clearly know about the existence and functions of the LPMD, the lack of community participation in development planning meetings and mutual cooperation activities, the lack of socialization in uniting opinions regarding development planning between communities as if development activities were only intended for unilateral interests. Therefore, the author wants to examine the problem regarding the roles and obstacles of the Village Community Empowerment Institution (LPMD) on the effectiveness of development planning in Merdeka village. This study aims to find out how the role and obstacles of the LPMD have on the effectiveness of development planning in Merdeka village. This study used qualitative research methods with 8 research informants. Data analysis techniques use data collection techniques, data reduction, and drawing conclusions. Then the data obtained by means of observation, interviews and documentation. The results of the study stated that the role of the LPMD as a Facilitator, Mediator, Motivator and Dynamist had not been implemented effectively in applying its duties as a village government relation in village development planning and implementation activities.

Keywords: *Role, LPMD, Development, Merdeka District*

ABSTRAK

Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan Desa Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. LPMD adalah mitra yang menyokong pemerintah desa dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Namun, ditemukan kendala dalam pelaksanaan perannya seperti masyarakat desa yang kurang mengetahui keberadaan dan fungsi LPMD dengan jelas, kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam musrembang dan kegiatan gotong royong, kurangnya sosialisasi dalam menyatukan pendapat mengenai perencanaan pembangunan antar masyarakat seakan kegiatan pembangunan hanya diperuntukan untuk kepentingan sepihak. Maka dari itu, penulis ingin meneliti permasalahan mengenai bagaimana peranan dan hambatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) terhadap efektivitas perencanaan pembangunan di desa Merdeka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan hambatan LPMD terhadap efektivitas perencanaan pembangunan di desa Merdeka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan informan penelitian sebanyak 8 orang. Teknik analisis data menggunakan teknik pengumpulan data,

reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian data didapatkan dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa peranan LPMD sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator dan Dinamisator belum dilaksanakan secara efektif dalam mengaplikasikan tugasnya sebagai relasi pemerintah desa pada kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Kata Kunci : Peranan, LPMD, Pembangunan, Kecamatan Merdeka

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Program Negara Indonesia yang terus mengusahakan pengembangan Pembangunan Nasional, supaya perkembangan pembangunan daerah juga wilayah desa dan kota beranjak sebanding dan setara. Tetapi pembangunan dalam implementasinya terus peruntuhkan dengan kendala utama pembangunan yaitu kesenjangan tingkat pembangunan dari desa hingga ke kota di Indonesia. Ketidakseimbangan pembangunan ini terjadi karena banyak kendala dan pengaruhnya, antara lain disebabkan oleh pembangunan di Indonesia tak merata.

Dalam lembaga pemerintah tentunya ada instansi yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk menyokong visi dan misi pemerintah yang bermaksud untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sangat dibutuhkan kemampuan SDM yang berkualitas dibidangnya agar bisa ikut membantu terwujudnya kesejahteraan yang di inginkan.

Kegiatan pembangunan yang

menuju ke desa perlu percepat, mengingat pedesaan memiliki nilai-nilai tradisional, sehingga sesuai dengan hakikatnya bahwa pembangunan tersebut bertujuan untuk membimbing mutu tradisionall tersebut kearah yang lebih modern baik pembangunan SDA maupun pembangunan SDM. Memandang begitu pentingnya pembangunan desa maka untuk terlaksananya tujuan itu dibuatlah suatu kelompok yang disebut dengan Lembaga Pebmerdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai penyalur kontribusi giat masyarakat desa, yang mempunyai peran dan fungsi dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembangunan didesa. Supaya suksesnya pembangunan itu maka sanga perlu kolaborasi yang baik diantara masyarakat dengan pemerintahan desa.

Sesuai PEMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2007 pada “ Pasal 1 ” MENGENAI Penataan Lembaga Kemasyarakatan menyebutkan bahwa lembaga kemasyarakatan yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan

Desa ini ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Dalam hal ini peranan LPMD dengan pemerintah desa harus dikembangkan, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, peran LPMD diperlukan sebagai pencetus atas kegiatan perencanaan pembangunan desa. Hal ini disebabkan LPMD sebagai dalang yang aktif dalam masyarakat sehingga pembangunan dapat berkebang dan berdaya guna menuju target yang telah disetujui dalam perencanaan dari bawah yang disatukan dengan perencanaan level nasional serta upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, karakter, keahlian, serta menggunakan SDM melalui penentuan haluan, kegiatann, juga pendampingan yang sinkron dengan esensi urusan dan preferensi kepentingan masyarakat desa.

Dalam hal ini Desa Merdeka yang ada dikecamatan Merdeka Kabupaten Karo juga mempunyai organisasi LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang memiliki tugas dalam memajukan pembangunan di Desa Merdeka. LPMD juga memiliki kepenyelenggaraan organisasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mnyokong pemerintahan

Desa dalam memberbayakan masyarakat terlebih dalam konteks pembangunan.

Perumusan Masalah

Dari uraian masalah yang disampaikan dilatar belakang masalah, penulis membuat rumusan masalah untuk diteliti antara lain sebagai berikut :

“Bagaimana peran dan hambatan yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo dalam Perencanaan Pembangunan Desa”

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Peranan

Peranan berasal dari kata “peran”. Peran mempunyai makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. (KBBI, 2007: 845) “peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”. Istilah “peran” sering diungkapkan sejumlah orang, peran juga disambungkan dengan posisi atau lhjabatan seseorang. Dan dalam suatu drama dikatakan sebagai actor. Kata jelasnya “peran” atau role dalam kamus oxford dictionary artinya : *Actor’s part; one’s or function.* yang artinya aktor ; kewajiban seseorang atau fungsi.

Berikut pembagian peran menurut Soekanto dibagi menjadi 3 yaitu :

1) Peran Aktif

2) Peran Partisipatif

3) Peran Pasif

Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah proporsi pencapaian dalam suatu tujuan dalam suatu organisasi. Dengan asumsi bahwa dalam mencapai tujuannya telah berjalan dengan benar. Mardiasmo (2017:134)

Efektivitas adalah hubungan antara hasil dan tujuan atau target yang ingin dicapai. Kegiatan fungsional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan maksud akhir prosedur (*spending wesely*). Efektivitas merupakan maksud keefektifan. Dalam suatu penelitian terhadap tinjauan teori pengkajian yang disebaran oleh Universitas Negeri Yogyakarta, efektivitas adalah berasal dari kata efektif dan dalam bahasa Inggris “*effective*” dengan arti berhasil dengan bagus.

Dari sebagian anggapan diatas mengenai efektivitas, kita dapat beralasan bahwa efektivitas komponen utama untuk mencapai tujuan atau sasaran yang susah ditetapkan didalam setiap kelompok, tindakan ataupun program, disebut efektif apabila mencapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan penilaian H.Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat, yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti mencapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Indikator dan Ukuran Capaian Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Berikut kriteria capaian sebuah efektivitas menurut Richard M (Steers 2005:53) :

a. Pencapaian Tujuan

Keutuhan usaha untuk mencapai tujuan harus dilihat sebagai suatu siklus. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan terakhir lebih aman, diperlukan pemetasan, baik dalam arti pemetasan pencapaian bagian-bagiannya maupun pemetasan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa

tokoh, yaitu: Rentang waktu dan target yang merupakan target substansial.

b. Integritas

Estimasi tingkat kapasitas kemampuan suatu organisasi untuk melaksanakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi yang berbeda. Koodinasi menyangkut siklus sosialisasi.

c. Adaptasi

Kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sehingga tolak ukur yang digunakan untuk proses perolehan dan interpolasi tenaga kerja.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), adalah lembaga atau penyalur yang dibentuk atas pergerakan masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat, dan merupakan kaki tangan pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

LPMD dibentuk untuk membantu Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa dalam berbagai aspek pembangunan. Sedangkan tujuan dibentuknya LPMD itu sendiri adalah untuk mewujudkan lembaga teknis yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam

hal menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

LPMD berkedudukan sebagai lembaga yang bersifat lokal dan merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan. Hubungan kerja LPMD dengan pihak lain bersifat kemitraan. Pihak lain sebagaimana dimaksud adalah Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.

Kegiatan LPMD ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- 1) Pemberdayaan masyarakat
- 2) Peningkatan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan
- 3) Pengembangan kemitraan
- 4) Peningkatan pelayanan masyarakat
- 5) Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai lembaga sosial masyarakat yang memiliki kewajiban sebagai berikut, sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan gerakan atau perencanaan pembangunan secara partisipatif melalui musyawarah
- b. Melaksanakan, mengontrol, menggunakan, dan mendorong serta meningkatkan pembangunan secara partisipatif

- c. Mempersiapkan dan menumbuhkan minat masyarakat partisipatif, gotong royong dan swadaya masyarakat.
- d. Menumbuhkembangkan semangat masyarakat dalam menguatkan pemberdayaan

Perencanaan Pembangunan Desa

Renana program pembangunan desa merupakan rangkaian tahapan kegiatan yang dikoodinasikan oleh Pemerintah Desa dengan mengikutsertakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan komponen masyarakat secara partisipatif dalam memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa untuk mencapai mencapai tujuan pembangunan desa yang berkesinambungan.

Perencanaan pembangunan didesa merupaan agenda harus dilaksanakan oleh Pemerintah setiap tahunnya yang disusun secara berjangka. Perencanaan kegiatan pembangunan desa merupakan proses kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. (PERMENDADRI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa). Perencanaan pembangunan desa ini terdiri atas dua yaitu penyusunan RPJM Desa dan dilakukan secara trigulasi (gabungan),

penyusunan RKP Desa

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan PEMENDAGRI No 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ada beberapa indikator yang akan dibahas berdasarkan pada fungsi dan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam perencanaan pembangunan wilayah desa sebagai mediator, sebagai fasilitator, sebagai dinamisator, dan juga sebagai Motivator.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan prosedur penelitian yang mendapatkan data dekriptif berupa data atau hasil wawancara tertulis dari informan yang diteliti dan diamati serta dari beberapa elemen terlibat dalam peranan lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan Desa. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada pandangan portpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna yang bertentangan dengan spekulasi.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang, yang terdiri dari

- 1) Informan utama, yaitu Ketua Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.
- 2) Informan pendukung, yaitu Kepala Desa Merdeka, 2 orang anggota LPMD, 2 orang perangkat Desa Merdeka, dan 2 tokoh masyarakat.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Desa Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo merupakan lokasi penelitian ini dilakukan. Dengan waktu penelitian yang dilaksanakan mulai bulan Mei sampai Juni, dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dikantor Desa Merdeka Kecamatan Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik dalam memperoleh data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Desa Merdeka

Pada awalnya Desa Merdeka bernama Desa Keling, Pada masa penjajahan, wilayah merupakan tempat

persembunyian suku India Keling. Dari situlah nama Desa tersebut diambil oleh penduduk asli ("*Simanteki Kuta*") yang bermarga Surbakti. Setelah zaman kemerdekaan, *Kuta Keling* berubah nama menjadi kampung Merdeka. Sekitar Tahun 1970-an, kampung Merdeka berubah nama menjadi Desa Merdeka bersamaan dengan terjadinya perubahan nama Desa diseluruh Kabupaten Karo.

Sampai Tahun 2007 Desa Merdeka masih berada dibawah naungan Kecamatan Simpang Empat. Pada awal Tahun 2008, terjadi pemekaran Kecamatan Kabupaten Karo, termasuk salah satunya Kecamatan Merdeka, maka sejak 2008 sampai sekarang Desa Merdeka menjadi ibukota Kecamatan Merdeka.

Adapun nama Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Merdeka sesuai penuturan tokoh adat sebagai berikut:

1. Rajangatas Surbakti
2. Bp. Ngolak Surbakti
3. Kolam Sembiring pandia
4. Mereksa Surbakti
5. Sinar Surbakti (Tahun 1987-1996)
6. Reken Sembiring Pandia (Tahun 1996-2009)
7. Karius Surbakti (Tahun 2009 - sekarang)

Peristiwa baik yang pernah terjadi di Desa Merdeka adalah:

1. Pada Tahun 1976 meraih Juara 1 perlombaan Desa Tingkat Kabupaten
2. Pada Tahun 1996 meraih Juara 1 Lomba Desa Tingkat Kabupaten
3. Pada Tahun 1996 meraih Juara 1 Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan
4. Pada Tahun 2010 meraih juara 2 Desa percontohan PKK
5. Pada Tahun 2013 meraih juara ADD terbaik di Kabupaten Karo
6. Pada Tahun 2019 meraih juara 1 Terbaik Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Karo.

Uraian Wawancara

1. LPMD Sebagai Fasilitator

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berperan sebagai fasilitator didesa dalam memfasilitasi segala kegiatan masyarakat terhadap perencanaan program pembangunan dan selanjutnya akan direalisasikan. LPMD juga berperan dalam mengusulkan pembangunan dan melakukan kolaborasi dengan elemen masyarakat dalam merancang usulan pembangunan.

Penulis mengajukan pertanyaan atau wawancara kepada ketua LPMD Desa Merdeka mengenai keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan pembangunan Desa, beliau mengatakan bahwa

“masyarakat dibolehkan untuk ikut dalam kegiatan perencanaan program pembangunan yang akan dibuat di desa,

dan semua itu harus diikutkan pada kegiatan rapat desa karena setiap elemen masyarakat pasti mempunyai usulan yang tak sama dan akan kita sampaikan kepada pemeritahan desa nanti pada saat musrembang/rapat desa”. (Wawancara dengan S. Surbakti di Kantor Desa Merdeka, senin 20 Juni 2022)

Dari wawancara tersebut menyimpulkan bahwa masyarakat turun ikut didalam merancang pembangunan didesanya guna mempercepat kemajuan khususnya dibidang pemberdayaan masyarakat dan peran LPMD dalam menampung aspirasi masyarakat cukup baik.

Kemudian dalam keikutsertaan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan penulis mewawancarai Sekretaris Desa Merdeka, beliau mengatakan *“Dari beberapa usulan pembangunan yang disampaikan oleh seluruh elemen masyarakat, baik dari beberapa tokoh lainnya diterima dan ditampung, kemudian disaring dan ditentukanlah mana yang lebih penting. Yang menjadi prioritas pembangunan di Desa Merdeka tahun 2022 adalah pembangunan jalan keladang.”. (Wawancara dengan A. Sembiring di Kantor Desa Merdeka, senin 20 Juni 2022)*

Dan kerjasama LPMD dalam pelaksanaan pembangunan penulis

melakukan wawancara dengan Sekretaris LPMD Desa Merdeka, beliau mengatakan :

“Dalam pelaksanaan pembangunan contohnya pembangunan jalan keladang pertanian masyarakat tentunya dibutuhkan alat berat seperti beko, mobil pengangkut galian, dan pengaspalan, kita kerjasama dengan PU, ada juga pengusaha dan untuk pengerjaannya jikalau dana kurang masyarakat turun membantu dalam bentuk swadaya dan gotong royong, jadi semuanya kerja sama antara masyarakat dan pemerintahan desa juga”. (Wawancara dengan S.Ginting dikantor Desa Merdeka, selasa 21 juni 2022)

Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa pengambilan mufakat untuk prioritas pembangunan didasarkan atas kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa Merdeka itu sendiri. Dan untuk setiap usulan yang di sampaikan masyarakat ditampung dan kembali diusulkan untuk anggaran tahun berikutnya.

2. LPMD Sebagai Mediator

Peran LPMD) sebagai Mediator dalam kegiatan pembangunan adalah mempunyai kewajiban dalam menyampaikan hasil-hasil dari ide/usulan rancangan pembangunan yang telah disepakati dan akan menjadi RPJM (rancangan pembangunan jangka menengah) kepada masyarakat. berikut hasil wawancara kepada salah perangkat Desa Merdeka, beliau mengatakan *“Setelah*

musrebang dilakukan biasanya RPJM, RKPDES dan anggaran untuk pembangunan desa dicetak di brosur dan baliho besar, dan ditempelkan ditempat strategis seperti gerbang masuk, kantor desa dan ada juga baliho besar yang dipajang dekat jambur/balai desa itu agar masyarakat tahu semua, dan kemudian ada juga yang di print lalu dibagikan kepada kepala dusun untuk disampaikan kepada warga masyarakatnya”. (Wawancara dengan A.S. Surbakti dikantor Desa Merdeka, senin 20 juni 2022)

3. LPMD Sebagai Motivator

Tentunya dalam sebuah perencanaan pembangunan desa terdapat berbagai masalah atau perbedaan pendapat, tanggapan serta usulan, maka LPMDlah yang berperan aktif mengidentifikasi serta memberikan solusi terkait masalah tersebut, seperti tanggapan dari Ketua LPMD yang mengatakan :

“yang pertama dulu, sebelum dimulainya musrebang kita terus mengingatkan masyarakat, karna sebagian mungkin sudah bosan terhadap usulannya yang berulang kali ternyata belum terkafer juga, kami pun terus mencari celah, dari sekian usulan mungkin ada yang bisa kita usulkan tidak dari APBDES, contoh kita memerlukan dragon beton lingkungan desa, kita lakukan pendekatan seperti ke PU”. (Wawancara dengan S. Surbakti di Kantor

Desa Merdeka, senin 20 juni 2021)

penulis mewawancarai salah satu masyarakat Desa Merdeka yaitu Pak Kris mengenai bentuk tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan, beliau mengatakan :

“Mereka selalu mengajak kami bersama baik disaat rapat maupun pada saat pembangunan dilakukan, seperti kemarin saat pembukaan jalan menuju keladang kami yang punya lahan ikut gontong-royong dengan perangkat desa bawa alat seperti parang, cangkul karna rata-rata disini petani jadi bawa alat itu aja”. (Wawancara dengan K. Tarigan di rumahnya, selasa 21 juni 2022)

4. LPMD Sebagai Dinamisator

Untuk mendorong pelaksanaan pembangunan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) harus lebih hati-hati dan responsif untuk mengamati pelaksanaan pembangunan yaitu dengan cara turut ikut serta didalam lingkaran masyarakat agar dapat memotivasi mereka supaya lebih berperan dan giat aktif di desanya. Peranan LPMD untuk menggerakkan, menimbulkan dinamika pembangunan juga sangatlah penting agar kebutuhan masyarakat akan pembangunan didesanya terpenuhi.

Penulis melakukan wawancara dengan Ketua LPMD mengenai hal itu, beliau mengatakan :

yang menghandel terus perangkat desa dan

“Jadi yang kita lakukan selama ini adalah pendekatan kepada masyarakat, kita bersosialisasi seperti disini ada dua gereja protestan dan katolik, dan ada juga umat muslim, kita edarkan surat mengenai rencana pembangunan agar dijelaskan kepada masyarakat kebutuhan pembangunan didesa ini sangat penting karena disitu lebih gampang untuk disampaikan, jadi sebagian juga seperti dijambur tadi ada pesta, ada orang kemalangan disitu juga kita sosialisasi bahwa tanggal sekian nanti kita akan melaksanakan musrembang, dan harapan kita semua bisa berperan dalam hal ini baik masyarakat terlebih pemerintahan desa”. (Wawancara dengan S. Surbakti, 20 juni 2021)

5. Faktor Penghambat

Berdasarkan dari berbagai peran LPMD di Desa Merdeka, dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektivitas tidak terbebas dari masalah, dengan hambatan itu mampu mengakibatkan peran LPMD dalam realisasi pembangunan di desanya tidak berajalan dengan baik.

Untuk Mendapatkan Informasi penulis mewawancarai Ketua LPMD dan masyarakat Desa Merdeka, beliau mengatakan

“Pengetahuan masyarakat tentang LPMD kurang, dikarenakan setiap ada kegiatan dari LPMD sendiri pun hanya ketua yang

berperan jadi masyarakat pun taunya cuman ada ketua LPMD dan perangkat Desa disetiap aspek pembangunan kemudian partisipasi masyarakat dan anggaran biaya pembangunan". (Wawancara dengan S. Surbakti dikantor Desa Merdeka, senin 20 juni 2021)

Pembahasan Hasil Penelitian

LPMD merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di setiap desa dengan Peraturan Desa, sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa yang disahkan atau dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan.

Keseluruhan dari hasil penelitian menggambarkan bagaimana peran LPMD terhadap kegiatan perencanaan pembangunan desadan didasarkan dari 4 tugas dan fungsinya seperti diamanatkan dalam UU No 06 Tahun 2014 tentang Desa, Hasil penelitian di Desa Merdeka menunjukkan bahwa peranan LPMD sebagai mitra pemerintahan desa dalam menjalankan program-program keaktifan masyarakat desa untuk menjadi

pembangunan yang sudah direncanakan rupanya belum berjalan optimal. Dari hasil penelitian juga menyatakan bahwa LPMD Desa Merdeka minim sekali berperan aktif didalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa yang nyatanya anggota LPMD tidak hadir tetapi hanya ketuanya saja dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Dari penelitian itu menyatakan bahwa LPMD di Desa Merdeka sangat kurang berperan didalam menyusun rencana pembangunan desa serta dalam mengajak dan mengikutsertakan masyarakat untuk saat musrembang.

Peranannya sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa merupakan Peran dari LPMD yang diteliti. Dari hasil penelitian, di Desa Merdeka fungsi LPMD yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap kegiatan pembangunan desa rendah sekali diterapkan. Anggota LPMD jarang sekali datang dan tidak hadir pada saat musyawarah perencanaan pembangunan desa yang menyebabkan usulan dari masyarakat tidak dapat tersampaikan atau diajukan oleh para anggota LPMD. Kemudian, LPMD juga kurang sekali berperan untuk mengupayakan atau melakukan tindakan dalam meningkatkan pendukung dan penunjang terapinya

pelaksanaan kegiatan program pembangunan desa yang sudah direncanakan dan disetujui.

Peran Lembaga Pembedayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai Fasilitator masih sangat rendah berdasarkan dari partisipasi masyarakat untuk ikut dalam menyimpulkan prioritas rencana pembangunan, masyarakat hanya mengiyakan saja yang sebabkan banyak masyarakat yang tidak hadir saat Musrembang. Berdasarkan wawancara dengan Ketua LPMD Desa Merdeka didapatkan hasil bahwa dalam menentukan rancangan prioritas pembangunan masyarakat yang datang bergabung maupun saat kami sosialisasi hanya mendengarkan dan mengiyakan saja.

Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Motivator belum efektif dan maksimal. pernyataan ini didasarkan dari hasil wawancara dengan Sekdes dan tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa yang ikut gontong-royong hanya yang punya lahan atau yang mendapatkan manfaat pembangunan itu secara langsung seperti saat pembangunan jalan keladang. Kemudian peran LPMD sebagai Dinamisator juga belum berjalan sepenuhnya, hal ini berdasarkan wawancara dengan masyarakat yang menyampaikan bahwa LPMD tidak secara rutin melakukan setiap rapat (musrembang) atau menjadi penyalur aspirasi dalam membahas

pengawasan bertahap sampe akhir lagi terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan, mereka hanya mengecek diawal saja.

Keseluruhan hasil penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa peran LPMD Desa Merdeka sangat kurang optimal berperan dalam pembangunan desa, baik dalam perencanaan program, kegiatan pelaksanaan program, dan juga dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan desa serta dalam mengajak dan mengikutsertakan masyarakat saat Musrembang. LPMD Desa Merdeka tidak dapat berperan aktif dalam perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan desa yang disebabkan karena para anggota LPMD sibuk keladang dan dengan pekerjaan lainnya.

5.SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan Desa Peranannya LPMD Sebagai fasilitator yang lebih mengarah pada mengajak atau mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berjalan optimal

dikarenakan banyak masyarakat yang tidak datang karena mereka sibuk dengan pekerjaannya berladang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya, dan dalam menentukan prioritas pembangunan masyarakat hanya mengiyakan aja yang disebabkan karena masyarakat tidak datang saat rapat (Musreimbang). Namun, Sebagai Mediator dalam mensosialisasikan informasi terkait pembangunan sudah berjalan baik dengan cara dicetak dispanduk, lalu dipajang ditempat yang strategis atau tempat umum seperti depan gerbang, dekat jambur/balaidesa, kantor desa agar masyarakat bisa tahu. Kemudian peran LPMD sebagai Motivator belum bisa mempengaruhi masyarakat sepenuhnya juga dalam peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat untuk bergabung aktif didalam kegiatan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan desa Merdeka. Masyarakat yang hanya ikut dan bergabung dalam kegiatan bila posisi suatu objek pembangunan berada dekat dengan ladang masyarakat. Dan sebagai dinamisator LPMD yang perannya mengadakan pertemuan/rapat tidak jelas terhadap informasi yang didapatkan oleh ditingkatkan lagi dengan cara mengajak seluruh anggota LPMD untuk berperan

masyarakat, dikarenakan dalam setiap agenda rapat yang menghandelnya adalah perangkat desa.

Maka dari itu LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) sudah melaksanakan perannya namun belum sepenuhnya optimal atau masih rendah sebagai mitra pemerintahan desa dalam perencanaan pembangunan desa Di Desa Merdeka.

2. Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo dalam perencanaan pembangunan Desa yaitu
 - a. Kurangnya sosialisasi keberadaan LPMD kepada masyarakat serta kurangnya keaktifan dan kekompakan anggota LPMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya
 - b. Kurangnya partisipasi masyarakat baik saat rapat maupun pada saat proses pelaksanaan pembangunan serta anggaran dana pembangunan yang terbatas.

Saran

Peneliti memberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan Peran LPMD sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator dan Dinamisator supaya lebih aktif serta mensosialisasikan keberadaan LPMD kepada masyarakat

sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintahan Desa agar segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan benar-benar terealisasi dengan baik.

2. Kedepannya Masyarakat juga diharapkan agar bisa berkolaborasi/bekerjasama dan meluangkan waktunya untuk bergabung dalam rapat yang dilaksanakan dan dibuat oleh LPMD, musrembang dan gontong-royong, dan juga penganggaran dana pembangunan bisa bekerjasama dengan lembaga lain dan tidak hanya bergantung dengan APBD sehingga perencanaan program pembangunan terlaksana dengan baik.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahadjo. 2016. *Pembangunan Pedesaan dan perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Desa Merdeka. 2017. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah*. Karo
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rodakarya
- Soekanto, Soerjono, 2012. *Membangun Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Siagian. Sondang P. 2015. *Eksekutif yang Efektif*. Jakarta. Bumi Aksara

Steers. Richard M. 2012. *Efektivitas Organisasi*, terjemahan. Jakarta: Penerbit Erlangga

Sugiono. 2013. *Metodologi penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan (Mixed Metode)*. (Bandung: Alfabeta)

Peraturan Dan UU

KEPPRES Nomor 49 Tahun 2001, *Tentang Penataan LKMD*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 *tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 *Tentang Perencanaan Pembangunan Desa*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No.72 tahun 2005 *Penataan Lembaga Desa*

Sumner Dari Internet

<https://ngestiharjo.bantulkab.go.id/first/artikel/1248-LPMD---Pengertian-->

[Tugas--Fungsi-Kewajiban](#)

<https://ped.desa.id/artikel/2018/8/8/lpmd-desapad>

<https://jraganan.desa.id/anggota-lembaga-perberdayaan-masyarakat-desa-lpmd/>

<https://www.pengadaan.web.id/2019/11/perencanaan-pembangunan.html>